

# Jurnal Anton Terbaru (REVISI PLAGIASI).pdf

*by*

---

**Submission date:** 13-Jan-2023 05:48PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1992235525

**File name:** Jurnal Anton Terbaru (REVISI PLAGIASI).pdf (255.22K)

**Word count:** 6676

**Character count:** 44610

## Efektivitas Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Sidoarjo

Anton Widodo <sup>1)</sup>, Nama Penulis Kedua <sup>\*2)</sup> (10pt)

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: \_\_\_\_\_@umsida.ac.id (wajib email institusi)

**Abstract.** *The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the KOTAKU program in reducing the area of slum settlements as well as the factors supporting and inhibiting the effectiveness of the KOTAKU program in reducing the area of slum settlements in Sruni Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative approach. Analysis of the data used is a qualitative analysis of Milles and Hubberman. The results of the study stated that the KOTAKU Program was effective because it met the indicators of clarity of objectives to be achieved, clarity of strategy for achieving program objectives, solid policy analysis and formulation processes, careful planning, proper program preparation, availability of work facilities and infrastructure, effective implementation and efficient, educational supervision and control system. The KOTAKU program has supporting and inhibiting factors. The supporting factors are the competence of the facilitator, adequate facilities, adequate budget, and a clear organizational structure. The inhibiting factors are incorrect information or hoaxes circulating on social media about the KOTAKU Program, and the limited number of facilitators in assisting program implementation.*

**Keywords -** KOTAKU Program; slum areas; policy effectiveness

**Abstrak.** *Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif Milles dan Hubberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa Program KOTAKU sudah efektif karena memenuhi indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan program, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Program KOTAKU tersebut memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni kompetensi fasilitator, fasilitas memadai, anggaran yang memadai, struktur organisasi yang jelas. Faktor penghambat yaitu informasi tidak benar atau hoax yang beredar di media sosial tentang Program KOTAKU, dan keterbatasan jumlah fasilitator dalam membantu implementasi program.*

**Kata Kunci -** Program KOTAKU; kawasan kumuh; efektivitas kebijakan

### I. PENDAHULUAN

Fenomena permukiman kumuh ini banyak didapati di berbagai daerah di dunia, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan lainnya. Salah satu penyebab mendasar munculnya permukiman kumuh ini adalah tidak lepas dari pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah, sedangkan kemampuan untuk mendirikan atau memiliki rumah yang layak huni sangat minim, sehingga banyak bermunculan rumah-rumah semi permanen yang tidak layak huni.

Sebuah rumah bisa disebut sebagai rumah yang layak huni jika memenuhi beberapa indikator, yaitu meliputi 1) akses terhadap kebutuhan dasar yang cukup, 2) sanitasi yang memadai, ketersediaan air bersih, 3) ketahanan bangunan, ruang hidup yang memadai, serta 4) jaminan layak huni [1].

Sedangkan menurut Sinulingga permukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang memiliki fungsi sebagai rumah tinggal dan sarana membina keluarga, namun rumah/lingkungan tersebut tidak layak untuk dijadikan hunian, sebab tingkat kepadatan bangunan yang terlalu tinggi, sarana dan prasarana yang minim, fasilitas umum yang sangat kurang, serta kondisi lingkungan yang kurang sehat [2]. Permasalahan lingkungan permukiman kumuh tersebut memang sangat kompleks, karena masalahnya tidak hanya terletak pada kondisi fisik bangunan dan tingkat kepadatannya, namun juga menyangkut kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat yang tinggal di tempat yang kumuh tersebut.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Adapun pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah usaha yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna menjaga fungsi lingkungan hidup serta menanggulangi adanya polusi, atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas usaha merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan, memelihara, mengawasi dan membina dan menegakkan hukum. Dengan demikian, lingkungan hidup pada intinya adalah suatu sistem yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang mencakup hampir semua unsur ciptaan makhluk hidup yang ada di bumi ini.

Dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan mengelola lingkungan menjadi lebih baik, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan perbagaikan lingkungan permukiman kumuh. Upaya-upaya tersebut masih terus dilakukan, walaupun pada kenyataannya problem permukiman kumuh itu masih terus bertumbuh, khususnya di sejumlah kota besar di Indonesia.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam sebuah hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terjadinya perluasan permukiman kumuh mencapai 1,37% setiap tahunnya, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1 Lampiran 1 luas kumuh pada tahun 2004 luas permukiman kumuh di Indonesia hingga sampai 54.000 hektar. Sedangkan tahun 2009, luas permukiman kumuh bertambah seluas 57.800 ha. Dalam jangka waktu lima tahun, kawasan kumuh menjadi meluas hingga 3.800 hektar. Selanjutnya, lewat Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015, pada tahun 2016 masih ada 35.291 hektar permukiman kumuh perkotaan yang menyebar di hampir semua wilayah Indonesia berdasar hasil perhitungan pengurangan luas permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Dirjen Cipta Karya. Kondisi itu diprediksi akan terus meningkat apabila belum ada wujud solusi yang efektif, komprehensif, serta tepat sasaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2015-2019, yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Amanat ini pada dasarnya selaras dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa mempunyai rumah dan lingkungan hidup yang layak dan sehat adalah kebutuhan dasar manusia, serta adalah hak warga negara Indonesia dan menjadi tugas Pemerintah dari level pusat sampai daerah guna melaksanakan tanggung jawab memberi perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia lewat implementasi perumahan dan kawasan permukiman supaya masyarakat dapat memiliki tempat tinggal dan mendiami atau tinggal di rumah yang pantas.

Amanat RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut kemudian dimanifestasikan oleh pemerintah ke dalam sebuah bentuk program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016 yang lalu. Sehingga lahirlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagai dasar hukum dari program KOTAKU tersebut.

Program KOTAKU ini pada dasarnya menjadi tugas besar Pemerintah Daerah selaku aktor utama dalam proses penanggulangan permukiman kumuh dan mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Tujuan dari program tersebut adalah guna memperbaiki akses kepada infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna menopang terealisasinya permukiman perkotaan yang layak dihuni, produktif dan berkesinambungan. Peningkatan akses kepada infrastruktur itu ditinjau pada kategori kekumuhan yang menjadi acuan perhitungan pengurangan luas kumuh berdasar pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang mencakup : 1) bangunan gedung; 2) jalan lingkungan; 3) penyediaan air minum; 4) drainase lingkungan; 5) pengelolaan air limbah; 6) pengelolaan persampahan; dan 7) proteksi kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang menjalankan dan menyukseskan program KOTAKU untuk mengentaskan permukiman kumuh, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/452/4041.3.2/205 tanggal 27 April 2015 Tentang Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, menurut Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/311/438.1.1.3/2021 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidoarjo terdapat 14 dari 18 Kecamatan di Sidoarjo yang masih memiliki kawasan kumuh, di antaranya Balongbendo, Candi, Gedangan, Krembung, Krian, Porong, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Waru, Jabon, dan Tarik. Salah satu kecamatan dengan kawasan kumuh yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Gedangan. Pada Kecamatan Gedangan sendiri terdapat 4 kelurahan/desa dengan kawasan kumuh, di antaranya Desa Bangah, Punggul, Sawotratap, dan Sruni.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, masih terdapat beberapa kawasan kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan dengan genangan air setelah turun hujan, terdapat jalan yang berlubang, adanya sampah di jalanan, serta masih ada permukiman yang tidak dilengkapi dengan fasilitas MCK. Selain itu terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh Tim Pelaksana Pembangunan Desa Sruni kurangnya kontribusi warga sekitar untuk mengurangi luasan permukiman kumuh, kurangnya dana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini layak dilakukan mengingat saat perencanaan sampai

proses pelaksanaan banyak terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh Tim Pelaksana Pembangunan Desa Srni, sehingga perlu diketahui sejauh mana efektivitas dari program KOTAKU di desa tersebut. Karena itulah penelitian ini berpusat pada dua persoalan yaitu Bagaimana efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?, serta Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

Charles O. Jones mengemukakan bahwa istilah kebijakan (*politic term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun seringkali dimaksudkan pada suatu kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering disamakan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standart, proposal, dan *grand design* [3].

Effendy memberikan definisi efektivitas berikut ini : “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” Efektivitas diartikan sebagai sebuah pengukuran atas capaian suatu saaran yang telah ditetapkan [4]. Taraf efektivitas bisa dinilai melalu perbandingan antara rencana yang sudah ditetapkan dan hasil yang diraih. Namun, apabila program yang dijalankan kurang tepat yang berdampak pada tujuan tidak dapat dicapai sesuai yang diinginkan, hal tersebut dinyatakan tidak efektif. Indikator atau ukuran capaian disampaikan oleh Siagian, yaitu adanya tujuan yang jelas, adanya strategi pencapaian tujuan yang jelas, adanya proses analisis dan perumusan kebijakan yang pasti, perencanaan yang matang, program yang disusun dengan tepat, sarana prasarana kerja yang tersedia, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan serta pengendalian yang mampu memberikan edukasi [5].

Pemukiman kumuh adalah sebuah kawasan yang didalamnya terdapat rumah beserta sarana dan prasarana yang tidak layak, tidak sehat, serta tidak tertata dengan baik [6]. Sedangkan menurut Yunus, permukiman kumuh adalah permukiman yang secara fisik material, fasilitas permukiman dan lingkungannya berada dibawah standar kelayakan [7]. Sinulingga mengartikan pemukiman kumuh sebagai sebuah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah yang memiliki fungsi sebagai rumah tinggal dan pembinaan keluarga, namun rumah atau lingkungan tersebut jika dilihat dari berbagai aspek merupakan lingkungan atau rumah yang tidak layak untuk di huni, baik dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat [2]. Olotuah, juga mendefinisikan perumahan kumuh sebagai sebuah lingkungan perumahan yang berada di bawah standar, dimana kondisi bangunan fisik yang rusak, lingkungan yang tidak sehat, dan tidak adanya fasilitas dasar seperti; listrik, air minum, sistem drainase, sekolah, fasilitas kesehatan, dan area rekreasi. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena penuaan bangunan yang terjadi secara alami, tidak adanya pemeliharaan, sanitasi yang buruk dan pemanfaatan tanah yang salah [8]. Menurut Suparlan dalam Oktaviansyah, pemukiman kumuh dapat dikenali dari fasilitas umum yang tidak memadai, kondisi hunian rumah tidak terawat dan kotor, dan tata letak pemukiman yang tidak teratur [9]. Menurut Budiharjo, pemukiman kumuh dapat dikenali melalui karakteristik rumah dan prasarana yang ada [10]. Menurut Hariyanto, munculnya kawasan kumuh (*slum*) bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung [11].

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong ruang lingkup penelitian kualitatif terbatas pada usaha mengungkap suatu permasalahan atau kondisi atau kejadian yang sebenarnya [12]. Hasil penelitian difokuskan pada deskripsi secara objektif mengenai suatu keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif yang diartikan mengeksplorasi pengalaman subjektif orang. Serta makna yang dan pengalaman-pengalaman yang saling berhubungan. Wawancara intensif sangat memungkinkan orang untuk berpendapat secara bebas dan memberikan interpretasi atas sebuah fakta dan perspektif mereka lah yang terpenting. Teknik penggunaan narasumber ini mempergunakan teknik *purposive sampling*. Berdasar pendapat Sugiyono teknik *purposive sampling* yaitu teknik penetapan sampel mengacu pada kriteria [13]. Kriteria informan atau narasumber riset ini yaitu orang memahami dan relevan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan fokus penelitian ini. Informan penelitian ini terdiri atas Koordinator Kota Program Kotaku Kabupaten Sidoarjo sebagai *key informan*, Kepala Desa Srni, Anggota LKM Desa Srni, dan Warga Masyarakat Desa Srni sebagai informan.

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian digunakan untuk memperdalam suatu penelitian. Fokus penelitian menurut Sugiyono, yaitu untuk membatasi suatu penelitian untuk memilih data mana yang sesuai, data yang relevan dan mana yang tidak relevan [13]. Perumusan suatu masalah dalam penelitian kualitatif lebih bersifat tentative, yang berarti penyempurnaan fokus suatu rumusan masalah tetap dilakukan walaupun sudah berada di lapangan. Adapun fokus studi ini yaitu:

1. Efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi luasan permukiman kumuh di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, meliputi: (a) Kejelasan tujuan program; (b) Kejelasan startegi pencapaian tujuan program; (c) Proses analisis dan perumusan kebijakan program yang mantap; (d) Perencanaan yang matang; (e) Penyusunan program yang tepat; (f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja; (g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; (h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik [14].

2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pemaparan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Sidoarjo efektif berdasarkan delapan indikator efektivitas. Berdasarkan pendapat Siagian tentang efektivitas program, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah meningkatkan implementasi program secara efektif [14].

#### A. Efektivitas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

##### *Kejelasan Tujuan Program*

Tujuan Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sangat jelas. Tujuan program KOTAKU ialah melakukan peningkatan akses kepada infrastruktur serta memberikan layanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna membantu terealisainya permukiman perkotaan yang pantas atau layak dihuni, produktif serta berkesinambungan.

Tujuan itu diraih lewat antara lain sebagai berikut: melakukan penurunan luas permukiman kumuh, terwujudnya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di level kabupaten/kota dan penanggulangan permukiman kumuh yang memiliki fungsi secara layak, terbentuknya rencana penanggulangan permukiman kumuh level kabupaten/kota serta level masyarakat yang terintegrasi dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), naiknya pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lewat upaya penyediaan infrastruktur serta aktivitas perbaikan penghidupan, perbaikan mutu permukiman kumuh, terealisasinya aturan bersama sebagai usaha perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur melalui perumusan indikator kinerja kesuksesan dan target pencapaian program yang akan bersumbangsiah kepada teraihnya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakni pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Secara umum pencapaian tujuan diukur melalui indikator outcome yaitu 1) terjadinya peningkatan akses masyarakat atas infrastruktur serta layanan perkotaan pada permukiman kumuh berdasarkan kriteria permukiman kumuh yang ditentukan a) saluran air, b) air minum bersih, c) pengelolaan sampah, d) pengelolaan air limbah, e) pengamanan kebakaran, f) ruang terbuka publik. 2) turunnya luasan permukiman kumuh sebab akses infrastruktur dan layanan perkotaan yang lebih layak, 3) terwujudnya dan berjalannya fungsi kelembagaan yakni Pokja PKP di level kabupaten/kota guna membantu program KOTAKU, 4) penerima manfaat merasa puas terhadap mutu infrastruktur dan layanan perkotaan di permukiman kumuh, 5) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui cara mendukung penghidupan berkesinambungan di wilayah kumuh.

Tujuan dibuatnya program KOTAKU ini dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator di atas. Apabila akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih, pengelolaan air limbah yang tidak mencemari lingkungan, pengelolaan persampahan yang baik, dan adanya Ruang Terbuka Hijau, maka program ini dapat dikatakan berhasil.

Tujuan yang jelas dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Srni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian (2008) bahwa implementasi program yang efektif dapat dinilai dari aspek tujuan program yang akan dicapai jelas. Tujuan yang akan dicapai oleh pelaksana kebijakan mesti jelas dan tidak ambigu. Sebab, jika ambigu akan berefek kepada penyimpangan program. Usaha mencapai tujuan program yang berkelanjutan serta jelas akan melahirkan keberlanjutan atas program yang efektif.

Hasil studi ini searah dengan studi yang dilaksanakan Fitriani yang menyebutkan bahwa penerapan program KOTAKU akan mampu meraih tujuannya apabila dibarengi oleh kejelasan tujuan [15]. Kejelasan tujuan yang akan dicapai menjadi kunci penting untuk mendapatkan efektivitas program.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Srni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo memiliki kejelasan tujuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Srni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo telah memenuhi indikator pertama dari efektivitas program, yakni kejelasan tujuan Program KOTAKU.

##### *Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan Program*

Strategi yang digunakan oleh Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sangat jelas. Strategi program KOTAKU ialah dengan melakukan pendekatan ke semua pihak secara tuntas. Strategi merupakan "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak terseok dalam pencapaian tujuan organisasi.

Strategi yang dijalankan guna mengatasi kawasan kumuh ini lewat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di antaranya menjalankan pendekatan penanganan kawasan kumuh yang berfokus dan selesai. Pada perencanaan tersebut, diharapkan sampai dengan proses penyelenggaraannya bisa terlaksana secara bersamaan, oleh karena di

samping tujuan penanganan dapat **4** raih tanpa membuat persoalan baru, strategi lainnya dalam penanganan dijalankan dengan menyeluruh, yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi, pergerseran kumuh dan mengembangkan kolaborasi antar pelaku, serta program dan pendanaan.

Strategi yang dibuat oleh Tim Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Sidoarjo ialah : 1) strategi Dasar Kolaborasi, yakni semua pelaku dalam mengatasi permukiman kumuh, 2) memperbaiki kapasitas dan menumbuhkan kelembagaan yang dapat melakukan kolaborasi serta mengembangkan jejaring dalam mengatasi permukiman kumuh dari level pusat hingga level masyarakat, 3) menngimplementasikan rencana partisipatif dan pembuatan anggaran yang terintegrasi dengan multisektor dan multiaktor, 4) membuat kepastian rencana penanggulangan permukiman kumuh dimasukkan ke dalam agenda RPJM Daerah dan pembuatan rancangan formal yang lain, 5) memberi fasilitas kolaborasi dalam memanfaatkan produk data serta rencana yang telah ada, mencakup juga dalam pembuatan kesepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang hendak dijadikan dasar atau pedoman bersama dalam perencanaan dan kontrol, pengawasan, 6) memperbaiki akses atas layanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota, 7) menumbuhkan perekonomian lokal sebagai sarana perbaikan kehidupan berkesinambungan, 8) pembelaan kepastian bermukim untuk masyarakat berpendapatan rendah kepada seluruh aktor kunci, 9) memberikan fasilitas perubahan sikap dan perilaku *stakeholder* dalam mempertahankan lingkungan permukiman supaya layak dihuni serta berkesinambungan.

Dengan adanya strategi dalam melaksanakan program, maka tujuan program akan lebih mudah tercapai. Hal ini dikarenakan strategi akan membantu pelaksana program untuk mencapai apa yang menjadi tujuan program, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak negatif yang terjadi jika program **3** tidak memiliki strategi dan prinsip.

Strategi yang jelas dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruti Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek strategi program yang akan dicapai jelas [14]. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan program mesti jelas serta tidak bias. Sebab, jika bias atau ambigu akan berefek kepada kesalahan sasa **5** program. Upaya mencapai tujuan program dengan menggunakan strategi yang jelas akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani yang menyatakan bahwa akibat strategi yang jelas akan membuat mudah dalam mencapai kriteria program KOTAKU [15]. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai menj **2** aspek penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruti Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki kejelasan dalam strategi Program KOTAKU. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruti Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator ke dua dari efektifitas program, yakni kejelasan dalam strategi pencapaian tujuan Program KOTAKU.

#### *Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan Program yang Mantap*

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional

Perumusan kebijakan merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau *problem* yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan- tindakan untuk masyarakat.

Wahab menyampaikan karakteristik kebijakan publik, yakni: 1) Kebijakan publik adalah kegiatan yang disengaja untuk dijalankan yang menuju pada tujuan tertentu. Bukan hanya sekedar kegiatan atau perbuatan menyimpang dan serba random, (*at random*) acak serta hanya kebetulan. Oleh karena, semua wujud kebijakan dalam sektor ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, dan yang lainnya adalah kegiatan atau perbuatan yang telah direncanakan (*by planed*). 2) kebijakan publik dalah kegiatan yang mempunyai bentuk atau pola dan saling berhubungan antara satu dengan lain yang mempunyai arah atau tujuan yang jelas, dijalankan oleh pejabat-pejabat negara atau pemerintah. Kebijakan publik bukan keputusan yang berdiri sendiri serta keputusan individu-individu saja. 3) Kebijakan publik ialah hal yang dijalankan oleh pemerintah dalam bidang tertentu, bukan hanya hal yang diharapkannya. Oleh karenanya mesti ada aksi nyata dalam mengatasi persoalan yang berlangsung. Kebijakan publik tidak hanya melalui kata-kata akan tetapi mesti dikerjakan guna meraih tujuan itu. 4) kebijakan publik bisa berwujud positif bisa juga berwujud negatif. Dalam kebijakan yang berwujud positif, pemerintah akan melakukan peran dalam sejumlah tertentu untuk mengatasi sebuah persoalan yang terjadi. Sementara itu, kebijakan publik yang berwujud negatif, pemerintah tidak memutuskan guna bertindak kepada sebiah permasalahan yang sesungguhnya memerlukan a **3** il pemerintah [16].

Strategi yang jelas dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruti Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek proses analisis perumusan kebijakan yang mantap [14]. Proses analisis perumusan kebijakan yang mantap dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. Proses analisis perumusan kebijakan yang mantap

yang dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila analisis dan perumusannya salah maka penangan masalah sulit tercapai. Upaya proses analisis perumusan kebijakan yang mantap akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dkk., yang menyatakan bahwa akibat proses analisis perumusan kebijakan yang mantap akan membuat mudah dalam mencaapai kriteria program KOTAKU [17]. Analisis perumusan kebijakan merupakan aspek penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki kematapan dalam proses analisis dan perumusan kebijakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator ketiga dari efektifitas program, yakni proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

#### *Perencanaan yang Matang*

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan setiap organisasi apapun kegiatannya tanpa melihat apakah yang bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlihat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

Dalam perencanaan Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sampai proses pelaksanaannya dapat berjalan beriringan, sehingga selain tujuan penanganan tercapai tanpa memunculkan masalah baru (kumuh baru), strategi lain dalam penanganannya dilakukan secara komprehensif, yakni infrastruktur, sosial dan ekonomi, dislokasi kumuh dan membangun kolaborasi antar pelaku, serta program dan pendanaan (tingkat komunitas, daerah dan pusat).

Program KOTAKU ditujukan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU mengimplementasikan rencana partisipatif dan pembuatan anggaran yang terintegrasi dengan multisektor dan multiaktor.

Program KOTAKU memiliki maksud guna melakukan pembangunan sistem yang terintegrasi untuk menangani pemukiman kumuh, dimana pemma memimpin dan melakukan kolaborasi dengan para stakeholder dalam melakukan perencanaan dan juga penerapannya, serta mengutamakan partisipasi masyarakat. Hasil perencanaan ini berpengaruh pada aktivitas prioritas guna meminimalisasi permukiman kumuh dan melakukan pencegahan atas munculnya permukiman kumuh baru, yang hendak dijalankan, baik oleh masyarakat ataupun oleh pihak lain yang mempunyai kepakaran atau kompetensi dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Perencanaan partisipatif dalam Program KOTAKU dapat dilihat dari peserta yang hadir saat rapat MUSREMBANGDES, yang diikuti oleh warga masyarakat meski kenyataannya dalam tahap perencanaan, peran partisipasi masyarakat dalam MUSREMBANG belum sepenuhnya berjalan optimal ataupun kurang aktif. Hal ini dikarenakan warga telah diwakilkan oleh aparat daerah, Badan Keswadayaan Masyarakat, tim KOTAKU Kota Sidoarjo, dan pihak swasta terkait.

Perencanaan yang matang dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek perencanaan yang matang [14]. Perencanaan yang matang dapat digunakan untuk menyusun program penanganan permukiman kumuh. Perencanaan yang matang dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila perencanaan salah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya perencanaan program yang matang akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus, dkk., yang menyatakan bahwa adanya perencanaan program yang matang akan membuat mudah dalam mencaapai kriteria program KOTAKU [17]. Perencanaan yang matang merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki kematangan dalam perencanaan program KOTAKU. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator keempat dari efektifitas program, yakni proses perencanaan yang matang.

#### *Penyusunan Program yang Tepat*

Pembuatan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Pembuatan program kerja sangat utama dijalankan guna bisa menjadikan lebih mudah aktivitas yang akan dijalankan supaya bisa terlaksana berdasar tujuan. Pembuatan program dijalankan melalui cara memandang permasalahan yang terdapat di dalam desa selanjtnya dijadikan dasar dalam pembuatan program guna mengatasi permasalahan tersebut. Pembuatan program kerja dijalankan melalui rapat dengan masyarakat.

2) Penyusunan program kerja KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ialah lewat Rembug Warga Tahunan (RWT) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). RWT adalah rapat bersama warga Desa atau perwakilan dari masyarakat (RT) dengan Pemerintah Desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta anggota, dan semua tokoh masyarakat dari semua bidang.

Pembahasan dalam RWT diantaranya ialah mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh BKM yang melaksanakan program kerja selama satu tahun. Di samping itu dilakukan pembahasan pula mengenai rancangan program kerja BKM untuk satu tahun ke depan.

Sejumlah program BKM semestinya diakomodasi dalam RPJM/RKP Desa, Renstra/Renja Kecamatan yang dilengkapi perencanaan detail dalam dokumen RPLP. Perencanaan di level Kelurahan/desa tersebut mestinya perlu sejalan dengan perencanaan level kabupaten/Kota dan adalah perwujudan dari visi, misi, strategi dan rencana proses implementasi program penanggulangan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten/Kota.

Petunjuk dari Pelaksanaan itu akan dijadikan dasar implementasi program di tingkat Kelurahan/desa yang dijadikan lokus sasaran Program KOTAKU. Harapannya, Petunjuk Pelaksanaan tersebut bisa dimengerti dan dijalankan secara maksimal oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU di level Kelurahan/desa, dengan demikian penyelenggaraan di level Kelurahan/desa mampu meraih tujuan dan sasaran yang diinginkan.

3) Penyusunan program yang baik dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek penyusunan program yang baik [14]. Penyusunan program yang baik dapat digunakan untuk mengatasi penanganan permukiman kumuh. Penyusunan program yang baik dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila penyusunan program 5) ah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya penyusunan program yang baik akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashad dkk., yang menyatakan bahwa adanya penyusunan program yang baik akan berdampak pada pencapaian kriteria program KOTAKU [18]. Penyusunan program yang baik merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki penyusunan program KOTAKU yang tepat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator kelima dari efektifitas program, yakni penyusunan program yang tepat.

#### *Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja*

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi, maka implementasi Program KOTAKU dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan sulit mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan dan terkait juga dengan sarana dan prasarana yang digunakan. Program yang dijalankan sangat tergantung dari sejauh mana dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan membuat pelaksana mudah dalam mewujudkan tujuan.

Program KOTAKU di Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sesuai dengan hasil studi sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sarana fisik antara lain terkait dengan kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sarana non fiksi antara lain pelatihan-pelatihan dan pendidikan, seminar atau *workshop*.

3) Penyusunan program yang baik dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek penyusunan program yang baik [14]. Penyusunan program yang baik dapat digunakan untuk mengatasi penanganan permukiman kumuh. Penyusunan program yang baik dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila penyusunan program 5) ah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya penyusunan program yang baik akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashad, dkk., yang menyatakan bahwa adanya penyusunan program yang baik akan berdampak pada pencapaian kriteria program KOTAKU [18]. Penyusunan program yang baik merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif. Hal tersebut mengacu pada indikator kejelasan tujuan program.

3) Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana program KOTAKU yang memadai. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator keenam dari efektifitas program, yakni tersedianya sarana dan prasarana program KOTAKU.

#### *Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien*

Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Implementasi program KOTAKU harus mengacu pada hasil yang tepat sesuai yang telah ditentukan. Selain itu, program juga harus berjalan efisien yaitu antara upaya dan biaya yang dilakukan dengan hasil yang didapat harus terukur.

Penyusunan program yang baik dalam implementasi program KOTAKU yang dijalankan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan teori Siagian bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari aspek penyusunan program yang baik [14]. Penyusunan program yang baik dapat digunakan untuk mengatasi penanganan pemukiman kumuh. Penyusunan program yang baik dapat digunakan menangani permasalahan. Karena apabila penyusunan program sudah maka penanganan masalah sulit tercapai. Upaya penyusunan program yang baik akan membuat program lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dkk., yang menyatakan bahwa adanya penyusunan program yang baik akan berdampak pada pencapaian kriteria program KOTAKU [19]. Penyusunan program yang baik merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Program KOTAKU di Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo melaksanakan program KOTAKU dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator ketujuh dari efektifitas program, yakni pelaksanaan yang efektif dan efisien.

#### *Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik*

Dalam menjaga dan memastikan Program KOTAKU berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka perlu pengawasan dan pengendalian. Melalui pengawasan yang baik maka penyimpangan dan penyelewengan dapat diminimalisasi atau dicegah. Melalui pengendalian yang baik maka pelaksanaan program dapat dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan pengendalian Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Adanya pengawasan dan pengendalian tidak terlepas dari sifat manusia yang tidak sempurna, perlu diawasi dan dikendalikan. Pengawasan dan pengendalian dalam Program KOTAKU berasal dari masyarakat, LKM, pemerintah desa, dan dari internal koordinator kota Sidoarjo sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dkk., yang menyatakan bahwa adanya penyusunan program yang baik akan berdampak pada pencapaian kriteria program KOTAKU [19]. Penyusunan program yang baik merupakan kunci penting untuk menjalankan program yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Sistem Pengawasan dan Pengendalian Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Bersifat Mendidik program KOTAKU dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator kedelapan atau terakhir dari efektifitas program, yakni sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo**

Dalam implementasi Program KOTAKU di Desa Sruni, tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas Program KOTAKU dalam melakukan pengurangan luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

#### *Faktor Pendukung Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*

Faktor pendukung efektivitas Program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu Kompetensi Fasilitator yang terlibat dalam implementasi Program KOTAKU sesuai dengan kebutuhan program, Fasilitas yang dimiliki Program KOTAKU dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima proyek Program KOTAKU telah dinilai memadai. Pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Sruni didukung dengan anggaran yang memadai yakni mendapatkan anggaran sebesar 995.000 juta rupiah yang berasal dari APBD agar seluruh program dan kebijakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan Struktur organisasi memberikan kejelasan tanggung jawab, kedudukan dan koordinasi antar anggota jelas, kejelasan jalur hubungan anggota, serta dapat sarana pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi Program KOTAKU. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Nurhasanah (2019), faktor pendukung program Kotaku di Kelurahan Merjosari adalah partisipasi masyarakat yang berupa tenaga, uang, serta harta benda yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

#### *Faktor Penghambat Program KOTAKU di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*

Faktor penghambat efektivitas Program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu informasi hoax dan keterbatasan kuantitas fasilitator. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fitri dan Sakawati faktor penghambat implemmentasi program KOTAKU di Kecamatan Tanete Riattang adalah keterbatasan lahan, pola pikir masyarakat dan anggota BKM yang tidak aktif [20].

#### IV. SIMPULAN

Menurut kepada uraian hasil studi yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, riset ini bisa dibuat simpulan bahwa Efektivitas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan teori Efektifitas Siagian [14] yang terdiri dari 8 (delapan) indikator, yakni efektivitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kab. Sidoarjo, sudah baik berdasarkan indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kab. Sidoarjo telah Program KOTAKU sudah merumuskan tujuan yang dapat dipahami oleh semua pihak dan telah disosialisasikan secara menyeluruh yakni meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan program, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah melibatkan semua pihak secara partisipatif. Berdasarkan indikator proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kab. Sidoarjo sudah dianalisis dan dirumuskan dengan matang sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Berdasarkan indikator perencanaan yang matang, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah direncanakan dengan matang dengan diikuti oleh warga masyarakat setempat secara partisipatif. Berdasarkan indikator penyusunan program yang tepat, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah menyusun program dengan tepat. Dalam menyusun semua program, semua pihak dilibatkan dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Berdasarkan indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sarana fisik antara lain terkait dengan kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sarana non fisik antara lain pelatihan-pelatihan dan pendidikan, seminar atau *workshop*. Berdasarkan indikator pelaksanaan yang efektif dan efisien, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah memberikan pengaruh positif bagi penurunan permukiman kumuh. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan Program KOTAKU dalam mengatasi penyebab permukiman kumuh, kawasan kumuh menjadi berkurang, permasalahan lingkungan seperti banjir dan akses jalan dapat teratasi. Berdasarkan indikator sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik yang melibatkan seluruh pihak seperti masyarakat, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan dari internal koordinator Kota Sidoarjo sendiri.

Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kab. Sidoarjo dalam melaksanakan program memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni. (a) kompetensi fasilitator; (b) fasilitas memadai; (c) anggaran yang memadai; (d) struktur organisasi yang jelas. Faktor penghambat yaitu : (a) informasi tidak benar atau hoax yang beredar di media sosial tentang Program KOTAKU; (b) keterbatasan jumlah fasilitator dalam membantu implementasi program.

Upaya yang bisa dijalankan oleh Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kab. Sidoarjo untuk mengefektifkan program tersebut yakni melakukan sosialisasi Program KOTAKU agar informasi mengenai program KOTAKU dapat diketahui semua pihak sehingga partisipasi masyarakat tinggi dalam mengurangi permukiman kumuh; program KOTAKU di Desa Srni Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan evaluasi program melalui pelatihan; program KOTAKU sebaiknya melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder; program KOTAKU perlu menerapkan teknologi dan informasi, sehingga SOP dapat membantu operasional implementasi program dapat berjalan lebih baik. Untuk meningkatkan efektivitas Program KOTAKU di Desa Srni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, perlu meningkatkan faktor-faktor pendukung program tersebut yakni dengan cara memberikan pelatihan atau seminar terhadap fasilitator mengenai program KOTAKU atau program-program kebersihan dan kesehatan lingkungan lainnya, mengembangkan fasilitas serta memperbaiki fasilitas program KOTAKU yang lebih baik, mengalokasikan anggaran untuk keperluan program KOTAKU dengan seefektif mungkin seperti dengan memprioritaskan keperluan yang paling dibutuhkan atau paling urgent, dan lebih memperjelas jobdesc dengan menghindari adanya tugas atau kewajiban ganda. Selain itu juga perlu mengatasi hal-hal yang menghambat program KOTAKU dengan memberantas informasi-informasi hoax mengenai program KOTAKU, membagikan informasi yang up-to-date agar masyarakat mengerti perkembangan program KOTAKU, serta menambah jumlah fasilitator.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berepran dalam penyusunan penelitian ini, terutama kepada informan penelitian yang terdiri dari Koordinator Kota Program KOTAKU Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Anggota LKM, dan warga masyarakat Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

### REFERENSI

- [1] D. Setiawan, G. Argenti dan M. F. Riski, "Peningkatan Kemampuan Sosial Masyarakat dan Komitmen Politik Kepala Daerah dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon," *Gorontalo: Jurnal of Government and Political Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 52-68, 2021.
- [2] B. D. Sinulingga, *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- [3] B. Winamo, *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*, Yogyakarta: CAPC (Center of Academic Publishing Service), 2016.
- [4] Effendy, *Efektivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- [5] S. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- [6] S. Kurniasih, "Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Pertukangan Utara Jakarta Selatan," *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur*, 2007.
- [7] H. S. Yunus, *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- [8] A. O. Olotuah, "Slums," *International Encyclopedia of Housing and Home*, 2012.
- [9] E. Oktaviansyah, "Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan," *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, vol. 4, no. 2, 2012.
- [10] E. Budiharjo, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Bandung: Alumni, 1998.
- [11] B. Santosa, "Kesiapan dan Kesiediaan Pemangku Kepentingan untuk Peremajaan Kawasan Kumuh Melalui Pembangunan Rumah Susun: Studi Kasus Di Kota Semarang," *Jurnal Perkotaan*, vol. 4, no. 2, 2012.
- [12] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- [14] S. P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- [15] P. Fitriani, "Penerapan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan," *Skripsi, UNNES, Semarang*, 2020.
- [16] S. A. Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- [17] H. Sitorus, R. S. Astuti dan H. Purnaweni, "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang," *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, vol. 8, no. 1, pp. 74-94, 2020.
- [18] H. Ashad, R. Musa dan A. N. Yanti, "Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur (Studi Kasus Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar)," *Fly Over: Open Journal System: Open Sciences Framework*, 2020.
- [19] Safrizal, Safuridar dan M. Fuad, "Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Langsa)," *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, vol. 12, no. 2, pp. 200-213, 2021.
- [20] A. Fitri dan H. Sakawati, "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone," *Skripsi, Universitas Negeri Makassar*, 2021.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

# Jurnal Anton Terbaru (REVISI PLAGIASI).pdf

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On